



NO. KATALOG :

# STATISTIK KRIMINAL

PROVINSI PAPUA BARAT

2014



**BPS PROVINSI PAPUA BARAT**

**STATISTIK KRIMINAL  
PAPUA BARAT 2014**

Nomor publikasi :  
ISBN :  
Katalog BPS : 4401002.91

Ukuran Buku : 16,5 x 21 cm  
Jumlah Halaman : v + 64 Halaman

Naskah :  
Seksi Statistik Ketahanan Sosial

Pengarah :  
Drs. Simon Sapary, M.Sc

Penyunting :  
Ratna M.H. Gusti

Gambar Kulit :  
Seksi Statistik Ketahanan Sosial

Diterbitkan Oleh :  
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya**

## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat 2014 ini merupakan edisi ketiga yang menyajikan data dan informasi terkait keamanan dan kriminalitas yang terjadi di Papua Barat.

Data dari publikasi ini bersumber dari Polres, data Statistik Potensi Desa (Podes), dan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS. Data dari Polres menggambarkan situasi keamanan berdasarkan pencatatan kejadian kejahatan yang dilaporkan masyarakat, atau kejadian yang pelakunya ketangkap tangan. Data Podes menggambarkan situasi keamanan di wilayah desa/kelurahan yang bersumber dari aparat desa setempat, sementara data Susenas menggambarkan situasi serupa berdasarkan informasi dari rumah tangga. Karena cara pendekatan pengumpulan data tersebut berbeda, maka ketiga jenis data tersebut tidak dapat dibandingkan.

Akhir kata, semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua *stakeholders* dan para perencana dan pengambil keputusan pembangunan keamanan di Papua Barat. Saran dan kritik membangun dari pembaca sangat kami harapkan dalam perbaikan publikasi di masa mendatang.

Manokwari, Desember 2015  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Papua Barat

Drs. Simon Sapary, M.Sc  
NIP. 19660607 199302 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3 Ruang Lingkup .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
2. METODOLOGI .....	5
2.1 Sumber Data .....	5
2.2 Konsep dan Definisi .....	7
2.3 Penjelasan Teknis .....	11
3. GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI PAPUA BARAT .....	13
3.1 Tingkat Perkembangan Kriminalitas .....	13
3.2 Jenis Tindak Kejahatan .....	17
3.3 Pelaku Kejahatan .....	19
3.4 Fenomena Konflik Massal .....	21
LAMPIRAN .....	23

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah Tindak Pidana dan Laju Perubahan Jumlah Tindak Pidana di Papua Barat Tahun 2009-2011.....	14
Gambar 3.2	Jumlah Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota 2011 .....	15
Gambar 3.3	Laju Perubahan Jumlah Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2011 .....	16
Gambar 3.4	Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (Crime clock) Menurut Kabupaten/Kota 2011 .....	17
Gambar 3.5	Persentase Jumlah Jenis Tindak Kejahatan Terhadap Fisik Manusia di Papua Barat Tahun 2010-2011 .....	19
Gambar 3.6	Persentase Jumlah Pelaku Kejahatan menurut Kategori Usia .....	20
Gambar 3.7	Persentase Jumlah Pelaku Kejahatan menurut Jenis Kelamin .....	20
Gambar 3.8	Persentase Jumlah Pelaku tindak Kejahatan di Papua Barat Tahun 2011 .....	21
Gambar 3.9	Persentase Jumlah Korban tindak Kejahatan di Papua Barat Tahun 2011 .....	22

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rasa aman (security) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia .....". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Walaupun negara dan pemerintah sudah melindungi dan menjamin kemandirian setiap warga negara, tetapi hal tersebut tidak serta merta dapat berdampak langsung dalam memberikan rasa aman bagi warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercermin dengan

kejadian kriminal yang sekarang marak menjadi pembicaraan di media. Perkembangan tingkat kriminal itu sendiri sangatlah sulit untuk diukur. Kecenderungan penilaian tentang rasa aman itu sendiri lebih mengarah kepada hal-hal negatif, seperti jumlah kejadian kejahatan di suatu daerah dengan indikasi apabila angka jumlah kejahatan meningkat, artinya tingkat keamanan di daerah tersebut menjadi buruk atau masyarakat daerah tersebut merasa semakin tidak aman.

Papua Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur dan fasilitas maupun pembangunan sumber daya manusia. Keamanan merupakan salah satu faktor yang tak terpisahkan dari proses pembangunan di Papua Barat yang sedang berlangsung saat ini. Pemerintah Daerah hendaknya dapat lebih apresiatif dalam melihat tingkat keamanan yang secara langsung mempengaruhi pembangunan di Papua Barat. Apabila tercipta kondisi yang aman dan kondusif, maka secara langsung akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan yang ditargetkan, serta warga akan melaksanakan aktifitas ekonomi dengan baik dan terbebas dari rasa takut.

**1.2**  
**Maksud dan Tujuan**

Pengukuran tingkat keamanan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sangat luas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi dan faktor lainnya. Dalam penulisan Publikasi Statistik Kriminal Papua Barat 2014 ini dimaksudkan agar diperoleh suatu data kewanaman yang berkesinambungan. Publikasi sebelumnya tahun 2012 dan 2013 telah menjelaskan tentang kondisi keamanan di Papua Barat dua tahun terakhir. Publikasi ini bertujuan untuk menyediakan data kewanaman yang berkesinambungan sehingga dapat dipakai sebagai alat ukur pembangunan serta analisis sektoral bidang keamanan di Papua Barat dalam kurun waktu yang dimaksud. Secara garis besar tujuan pembuatan publikasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara makro tentang situasi keamanan di Papua Barat tahun 2104.

**1.3**  
**Ruang Lingkup**

Publikasi Statistik Kriminal Papua Barat ini menyajikan data dan informasi tentang kejadian kejahatan, korban kejahatan yang terjadi di Papua Barat untuk tingkat kabupaten/kota selama tiga tahun terakhir. Ketersediaan data dan indikator kejadian kejahatan, jenis kejahatan dan korban kejahatan disajikan dari tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang bersumber dari Kepolisian resort (Polres) kabupaten/kota.



## **1.4** **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan publikasi ini terdiri dari empat bagian yang terdiri dari Bab 1 yang menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup serta sistematika penulisan publikasi. Bab 2 metodologi yang menyajikan tentang sumber data dan konsep dan definisi yang dipakai dalam publikasi ini. Bab 3 menyajikan tentang perkembangan kriminal di Papua Barat yang meliputi banyaknya kejadian kejahatan, jenis-jenis tindak kejahatan serta korban kejahatan yang terjadi selama tiga tahun terakhir.

<http://papuabarat.bps.go.id>

## BAB II METODOLOGI

### **2.1** **Sumber** **Data**

Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari beberapa sumber diantaranya :

1. Polres/Polresta di Papua Barat yang mencakup data jumlah kejadian kejahatan, jenis kejahatan, serta pelaku kejahatan yang bersumber dari data Survei Statistik POLKAM tahun 2011-2014.
2. Data jumlah dan karakteristik korban tindak kejahatan yang diolah dari raw data Susenas 201.

#### **Survei Statistik Politik dan Keamanan (Polkam)**

Survei Statistik Politik dan Keamanan (POLKAM) merupakan survei rutin yang diselenggarakan oleh BPS setiap tahun, dengan mengumpulkan data-data terkait politik dan keamanan. Responden/ sumber data dari survei POLKAM ini adalah instansi terkait yang antara lain mencakup Pemerintah Daerah (Pemda), Sekretaris Dewan (Setwan), Kepolisian, KPU, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri (PN). Untuk penyusunan Publikasi Statistik Kriminal Papua Barat 2013 hanya diambil data yang bersumber dari Kepolisian level kabupaten/kota yang mencakup karakteristik kejadian tindak kejahatan, pelaku kejahatan dan jumlah kerugian akibat tindak kejahatan.

## **Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)**

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan survei yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala setiap tahun. Data Susenas mencakup dua kelompok data, yaitu Kor dan Modul. Data Kor sendiri mencakup data pokok dari beberapa aspek kesejahteraan rakyat, termasuk kriminalitas. Data kriminalitas yang dikumpulkan adalah data jumlah dan karakteristik rumah tangga/individu yang menjadi korban kejahatan.

Sejak pertama kali kegiatan Susenas diselenggarakan, yaitu pada tahun 1963, Susenas telah memiliki modul kriminalitas. Modul ini mencakup data-data kriminal secara lengkap dan rinci dengan pendekatan korban rumah tangga/individu. Data yang dikumpulkan antara lain meliputi data jenis dan frekuensi kejahatan, pelaku kejahatan, akibat yang ditimbulkan secara fisik maupun psikis, kerugian yang diderita. Namun, karena beberapa hal, modul kriminalitas sejak tahun 1995 tidak dilakukan lagi.

## **2.2** **Konsep dan** **Definisi**

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini serta jenis sumber data yang menghasilkan data tersebut, konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini juga merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan sesuai dengan urutan sumber data.

### **2.2.1. Konsep-Konsep Kriminalitas Dalam Laporan Data Kriminalitas**

#### **A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran**

- a. *Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran* merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
- b. *Peristiwa yang dilaporkan* ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
- c. *Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian*, adalah :
  - ◆ Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
  - ◆ Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang

- ◆ Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid.
- ◆ Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- ◆ Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- ◆ Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

## **B. Pelaku Kejahatan**

a. *Pelaku Kejahatan adalah :*

- ◆ Orang yang melakukan kejahatan.
- ◆ Orang yang turut melakukan kejahatan.
- ◆ Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- ◆ Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- ◆ Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

b. Klasifikasi pelaku kejahatan menurut umur :

- ◆ Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- ◆ Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- ◆ Umum adalah anak-anak dan dewasa.

## **C. Tahanan**

*Tahanan* adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

#### D. Kerugian

*Kerugian* adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

#### E. Korban

**Korban kejahatan** adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha /percobaan tindak kejahatan.

### 2.2.2. Konsep-Konsep Kriminalitas Dalam Susenas dan Podes

#### A. Kejahatan/ Kriminalitas

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Susenas dan Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Susenas atau Podes lebih terfokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

## B. Korban Kejahatan

Konsep korban kejahatan dalam Susenas adalah korban/sasaran dari tindak kejahatan yang terjadi dalam rentang waktu selama setahun yang lalu. Korban kejahatan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dan individu. Penentuan kriteria korban kejahatan ini hanya berdasarkan pada pengakuan responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya.

Rumah tangga korban kejahatan adalah rumah tangga yang selama setahun lalu pernah mengalami kejadian atau usaha/percobaan tindak kejahatan yang sasarannya adalah harta atau kekayaan milik rumah tangga, misalnya pencurian televisi milik rumah tangga, pencurian ternak, termasuk pembunuhan terhadap salah satu anggota rumah tangga.

Individu dikatakan sebagai korban kejahatan jika individu yang bersangkutan selama setahun yang lalu pernah mengalami kejadian atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

## C. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

- ◆ ***Perkelahian antar kelompok warga*** adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.

- ◆ **Perkelahian warga antar desa/kelurahan** adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/ nagari lainnya.
- ◆ **Perkelahian warga dengan aparat keamanan** adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
- ◆ **Perkelahian warga dengan aparat pemerintah** adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.
- ◆ **Perkelahian antar pelajar/mahasiswa** adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
- ◆ **Perkelahian antar suku/etnis** adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.
- ◆ **Perkelahian Lainnya** adalah perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan dan sebagainya.

## 2.3

Penjelasan  
Teknis

### 1. Angka Indeks Kejahatan ( It )

$$It = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

### 2. Angka kejahatan per 10.000 Penduduk ( *Crime Rate* )

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$$



**3. Skala waktu kejahatan tahun t (*Crime clock*)**

$$= \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun t}} \times (\text{Detik})$$

**4. Persentase penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*Crime clearance*)**

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 (\%)$$

<http://papuabarat.bps.go.id>

## BAB III

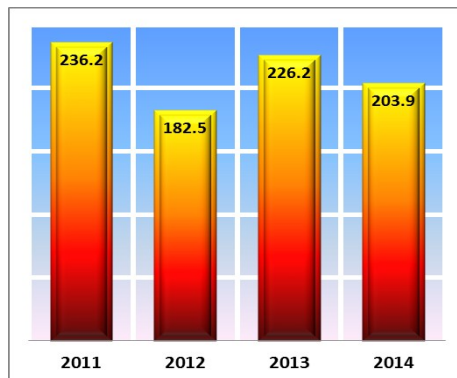
### GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI PAPUA BARAT TAHUN 2014

#### 3.1 Tingkat Perkembangan Kriminalitas

Tingkat kriminalitas di Papua Barat dari tahun 2011 hingga 2014 berfluktuasi. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir (tahun 2011-2014), laju perubahan jumlah kejadian tindak pidana di Papua Barat menurun sebesar 10,94 persen dari tahun 2013-2014. Perkembangan kenaikan jumlah tindak pidana selama kurun waktu 2012-2013 sebanyak 437 kasus atau meningkat 0,19 persen mulai menunjukkan perbaikan pada kondisi 2013-2014 dimana terjadi penurunan jumlah kasus tindak pidana sebanyak 223 kasus.

**Gambar 3.1**

Jumlah Tindak Pidana di Papua Barat Tahun 2011-2014



Sumber : Data Polres/Polresta Se-Papua Barat

### Gambar 3.2

Jumlah Tindak Pidana menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat  
Tahun 2014



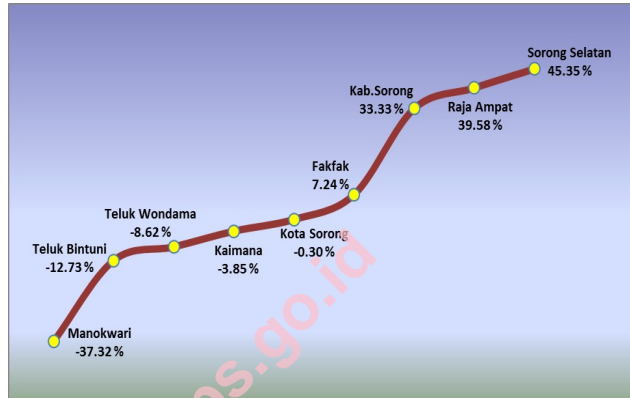
Sumber : Data Polres/Polresta Se-Papua Barat

Ket : Kab. Manokwari kondisi tahun 2013

Perkembangan kriminal di Papua Barat dalam kurun tahun 2014 memperlihatkan suatu fenomena yang memperhatikan. Gambar 3.2 menunjukkan suatu yang menarik yaitu Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat justru tingkat jumlah tindak pidana terbesar yakni 678 kasus atau sekitar 29,97 persen. Kota Sorong memiliki kemiripan dengan Kabupaten Manokwari terkait jumlah tindak pidana di tahun 2013 (669 kasus). Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan Raja Ampat merupakan Kabupaten dengan tingkat keamanan terbaik di tahun 2013. Hal ini ditunjukkan melalui tingkat tindak pidana kejahatan kurang dari 60 kasus setahun, atau rata-rata 5 kasus terjadi tiap bulan.

### Gambar 3.3

Laju Perubahan Jumlah Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2013



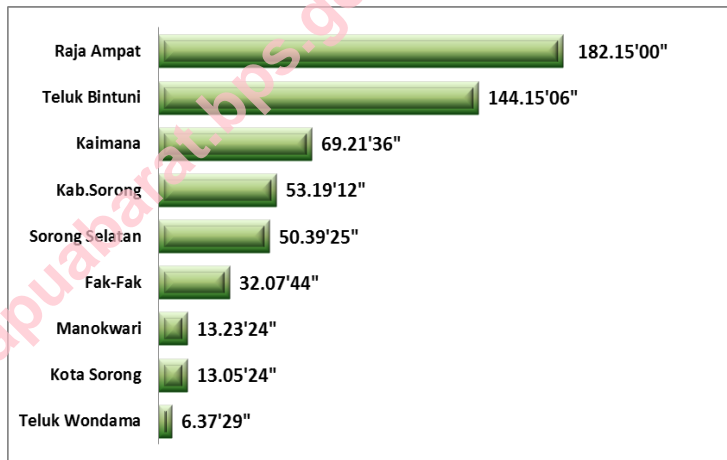
Sumber : Data Polres/Polresta Se-Papua Barat

Pola perubahan jumlah tindak kriminal (*Crime Total*) Tahun 2011-2013 masing-masing Kabupaten/Kota sangat bervariasi. Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat dan Kabupaten Sorong adalah daerah dengan jumlah laju pertumbuhan tindak pidana tertinggi yakni 30-45 persen selama kurun waktu 3 tahun (2011-2013). Kabupaten Fak-Fak memiliki tingkat pertumbuhan tindak pidana kejahatan sebesar 7,24 persen. Kabupaten Manokwari secara agregasi tingkat kriminal tertinggi tahun 2013, tetapi jika dikaji menurut laju pertumbuhan tingkat kejadian tindak pidana, Manokwari merupakan satu-satunya wilayah yang menurun angka tindak pidana kejahatan sebanyak 3 kali lipat (2011-2013). Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana dan Kota Sorong menunjukkan tingkat keamanan yang lebih baik. Hal ini dilihat dari jumlah tingkat tindak pidana yang menurun (2011-2013).

Indikator kriminal berikut yang memiliki peningkatan cukup bervariasi adalah selang waktu terjadinya kejahatan (*Crime clock*). Semakin kecil selang waktu terjadinya kejahatan, maka keamanan di wilayah tersebut semakin buruk dan begitu juga sebaliknya. Gambar 3.4 dibawah ini menunjukkan rata-rata selang waktu terjadinya satu kejahatan dengan kejahatan berikutnya.

**Gambar 3.4**

Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (*Crime clock*)  
Menurut Kabupaten/Kota 2013



Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat

Kabupaten Manokwari dengan jumlah kasus tindak pidana tertinggi pada tahun 2013 sebanyak 678 kasus, memiliki *Crime clock* sebesar 13.23'24" yang artinya dari 678 kasus yang terjadi di tahun 2013, selang terjadinya kejadian kasus kejahatan dengan kasus kejahatan berikut adalah 13 jam 23 menit dan 24 detik. Kabupaten Raja Ampat *Crime clock* tertinggi yakni 7 hari 5 jam 15 menit dan 00 detik.

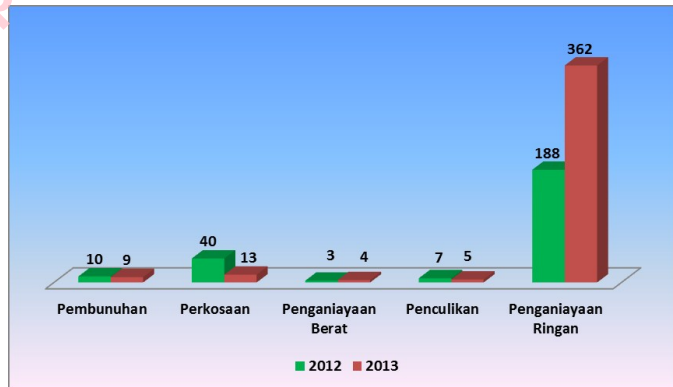
Kategori daerah rawan ditunjukkan dengan selang terjadinya kejadian (crime clock) kurang dari 1 (satu) hari. Ada 3 Kabupaten/Kota yang terkategori rawan antara lain Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong dengan crime clock masing-masing sebesar 6 jam, 37 menit, 29 detik, 13 jam, 23 menit, 24 detik dan 13 jam, 5 menit, 24 detik.

### 3.2 Jenis Tindak Kejahatan

Salah satu bentuk tindak kejahatan adalah kejahatan terhadap fisik manusia. Kejahatan terhadap fisik manusia terdiri dari pembunuhan, perkosaan, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penculikan.

**Gambar 3.5**

Jumlah Tindak Kejahatan Terhadap Fisik Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2013

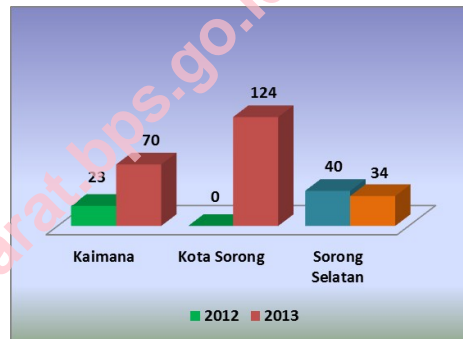


Sumber : Data Polres/Polresta Se-Papua Barat

Perkembangan jumlah kasus kejahatan terhadap fisik manusia dari tahun 2012 hingga 2013 secara rata-rata meningkat drastis. Kejahatan yang menunjukkan peningkatan cukup signifikan adalah penganiayaan ringan. Sedangkan untuk kasus yang jumlahnya menurun cukup signifikan adalah kasus pemerkosaan.

**Gambar 3.6**

Jumlah Tindak Kejahatan Penganiayaan Ringan di 3 (Tiga) Kabupaten/Kota Tahun 2012-2013



Sumber : Data Polres/Polresta Se-Papua Barat

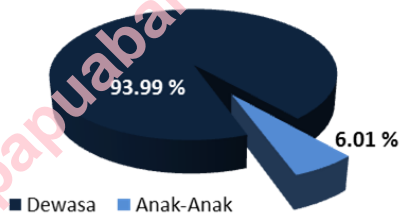
Peningkatan jumlah kasus penganiayaan ringan yang sangat menonjol terdapat di Kabupaten Kaimana dan Kota Sorong yang bertambah sebesar 47 kasus dan 124 kasus. Sedangkan Kabupaten Sorong Selatan memiliki penurunan jumlah penganiayaan ringan sebesar 6 kasus (gambar 3.6).

Hal yang perlu menjadi perhatian kita yakni kasus tindak pidana penculikan. Dalam kurun waktu 2012-2013 kasus tindak pidana penculikan hanya terjadi di Kota Sorong, yakni sebanyak 7 kasus di tahun 2012 menurun menjadi 5 kasus di tahun 2013.

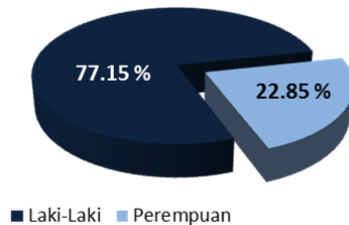
### 3.3 Pelaku Kejahatan

Laporan tahunan Polres Kabupaten/Kota mengungkap bahwa jumlah aksi tindak kriminalitas yang terjadi selama tahun 2013 sebanyak 2.429 orang pelaku yang terklasifikasi laki-laki sebanyak 1.874 orang (77,15 %) dan perempuan sebanyak 555 orang (22,85%). Jika ditelusuri jumlah pelaku kejahatan menurut kategori umum terungkap bahwa pelaku kejahatan dengan usia dewasa sebanyak 2.283 orang (93,99%) dan pelaku kejahatan kategori usia anak-anak sebanyak 146 orang (6,01%).

**Gambar 3.7**  
Persentase Jumlah Pelaku Kejahatan menurut Kategori Usia

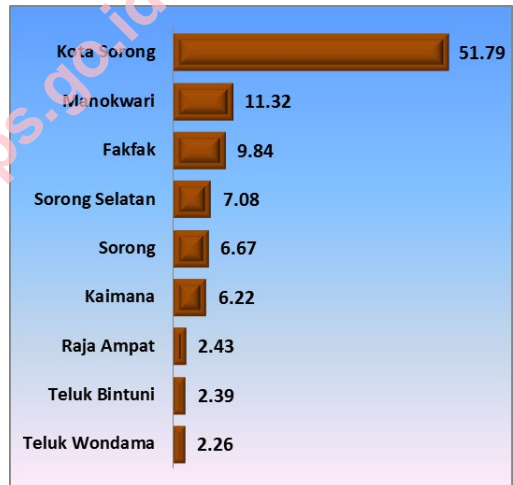


**Gambar 3.8**  
Persentase Jumlah Pelaku Kejahatan menurut Jenis Kelamin





Jumlah pelaku kejahatan tertinggi adalah kota sorong 1.258 jiwa berikutnya adalah Kabupaten Manokwari sebanyak 275 orang pelaku (lampiran 10). Jika disandingkan dengan jumlah tindak kejahatan dengan pelaku kejahatan, terungkap bahwa Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong memiliki intensitas kejahatan tertinggi di Papua Barat. Untuk Kabupaten dengan persentase jumlah pelaku kejahatan terendah adalah Kabupaten Raja Ampat (2,22 persen).



**Gambar 3.9**  
 Persentase Jumlah  
 Pelaku tindak  
 Kejahatan di Papua  
 Barat Tahun 2013

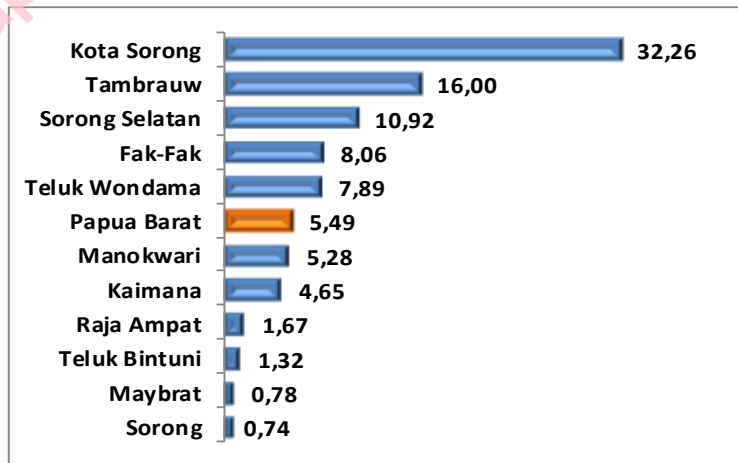
Jumlah pelaku tindak kejahatan pada tahun 2013 di Papua Barat jika dirinci menurut kewarganegaraan, terungkap bahwa pelaku kejahatan di Papua Barat keseluruhannya adalah Warga Negara Indonesia (lampiran tabel 12) dengan komposisi pelaku kejahatan laki-laki 91,57 persen dan untuk pelaku kejahatan perempuan sebanyak 8,43 persen.

### 3.4 Fenomena Konflik Masal

Bangsa Indonesia dikenal dengan kemajemukan suku bangsa, bahasa, etnis dan budaya. Kemajemukan tersebut merupakan bagian dari kekayaan bangsa ini. Akan tetapi di lain pihak, kemajemukan ini dapat memicu terjadinya konflik massal secara internal di beberapa wilayah seperti contoh kasus Sambas Kalimantan Barat (1999) dipicu oleh masalah etnis, kasus Poso (1998) dipicu oleh perbedaan Agama dsb.

Dalam publikasi ini dimuat mengenai informasi tentang insiden konflik massal, karakteristik konflik massal, faktor-faktor yang mempengaruhi konflik massal dan upaya penyelesaian konflik massal tersebut. Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari data Potensi Desa (PODES) tahun 2014.

**Gambar 3.10** Persentase Jumlah Korban tindak Kejahatan di Papua Barat Tahun 2011



Data PODES 2014 mengungkapkan bahwa pada tahun 2011, sebanyak 5,49 persen jumlah desa, atau sebanyak 79 dari 1.439 desa di Papua Barat terdapat kejadian konflik masal dengan begitu beragam jenis serta inisiator yang menyelesaikan masalah konflik massal tersebut (lihat lampiran table 21).

Hal menarik yang dapat dilihat yaitu dari faktor yang menyebabkan terjadinya konflik massal antar warga. Dari total 96 kasus konflik masal yang terjadi, sebanyak 19 kasus atau sekitar 19,79 persen yang dilatarbelakangi oleh permasalahan asmara. (Lihat lampiran tabel 16).

Dari 79 desa yang mengalami konflik masal, persentase penyelesaian konflik sebesar 92,41 persen terselesaikan dan 7,59 persen tidak dapat terselesaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa modal sosial dalam masyarakat perlu ditanamkan lebih baik lagi, sehingga penyelesaian masalah atau konflik dalam masyarakat dapat terselesaikan dan tidak berbuntut panjang.

Untuk inisiator yang aktif dalam menyelesaikan masalah, persentase terbanyak adalah tokoh masyarakat (38 persen) dan aparat keamanan (30 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa konflik masal yang terjadi dapat terselesaikan dengan cepat apabila tokoh masyarakat atau tokoh agama yang menyelesaikan konflik.

# LAMPIRAN

<http://papuabarat.bps.go.id>

**Tabel 1.**  
**Jumlah Tindak Pidana (*Crime Total*) di Papua Barat**  
**Tahun 2012-2014**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	257	290	229
Kaimana	215	130	204
Teluk Wondama	45	58	99
Teluk Bintuni	53	55	114
Manokwari	488	678	-
Sorong Selatan	108	172	170
Sorong	112	162	222
Raja Ampat	56	48	82
Kota Sorong	491	669	919
<b>Papua Barat</b>	<b>1.825</b>	<b>2.262</b>	<b>2.039</b>

*Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat*

- Catatan :
1. Keberadaan Polres untuk Kabupaten Tambrauw dan Maybrat belum ada, sehingga Data Kabupaten Tambrauw dan Maybrat masih tergabung dalam data Kabupaten Induk yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
  2. Data Kriminal untuk Papua Barat merupakan akumulasi dari data semua Polres/ Polresta se-Papua Barat untuk setiap indikator kriminalitas.
  3. Data Jumlah Tindak Pidana Kab. Manokwari tidak terbit.

**Tabel 2.**  
**Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan**  
**di Papua Barat Tahun 2012-2014**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	246	270	220
Kaimana	110	105	171
Teluk Wondama	31	45	83
Teluk Bintuni	34	39	83
Manokwari	276	525	-
Sorong Selatan	72	99	109
Sorong	77	99	146
Raja Ampat	40	44	75
Kota Sorong	316	393	589
<b>Papua Barat</b>	<b>268</b>	<b>398</b>	<b>1.476</b>

*Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat*

- Catatan : 1. Keberadaan Polres untuk Kabupaten Tambrauw dan Maybrat belum ada, sehingga Data Kabupaten Tambrauw dan Maybrat masih tergabung dalam data Kabupaten Induk yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
2. Data Kriminal untuk Papua Barat merupakan akumulasi dari data semua Polres/ Polresta se-Papua Barat untuk setiap indikator kriminalitas.
3. Data Jumlah Tindak Pidana Kab. Manokwari tidak terbit.

**Tabel 3.**  
**Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*)**  
**di Papua Barat Tahun 2012-2014**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	95,72	93.10	96.00
Kaimana	51,16	80.77	84.00
Teluk Wondama	68,89	77.59	83.80
Teluk Bintuni	64,15	70.91	72.17
Manokwari	56,55	77.43	-
Sorong Selatan	66,67	57.56	64.12
Sorong	68,75	61.11	66.00
Raja Ampat	71,43	91.67	63.50
Kota Sorong	53,74	58,57	64.09
<b>Papua Barat</b>	<b>63,88</b>	<b>64,73</b>	<b>72.39</b>

*Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat*

- Catatan : 1. Keberadaan Polres untuk Kabupaten Tambrauw dan Maybrat belum ada, sehingga Data Kabupaten Tambrauw dan Maybrat masih tergabung dalam data Kabupaten Induk yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
2. Data Kriminal untuk Papua Barat merupakan akumulasi dari data semua Polres/ Polresta se-Papua Barat untuk setiap indikator kriminalitas.
3. Data Jumlah Tindak Pidana Kab. Manokwari tidak terbit.

**Tabel 4.**  
**Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (*Crime clock*)**  
**di Papua Barat Tahun 2012-2014**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	25.13'36"	32.07'44"	13.77'11"
Kaimana	116.55'12"	69.21'36"	42.56'24"
Teluk Wondama	143.34'54"	6.37'29"	3.18'54"
Teluk Bintuni	96.48'00"	144.15'06"	-
Manokwari	21.36'00"	13.23'24"	-
Sorong Selatan	56.9'11"	50.39'05"	50.21'10"
Sorong	7.33'36"	53.19'12"	39.27'36"
Raja Ampat	39.4'00"	182.15'00"	163.35'5"
Kota Sorong	14.53'49"	13.05'24"	10.15'36"
<b>Papua Barat</b>	-	-	

*Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat*

- Catatan : 1. Keberadaan Polres untuk Kabupaten Tambrauw dan Maybrat belum ada, sehingga Data Kabupaten Tambrauw dan Maybrat masih tergabung dalam data Kabupaten Induk yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
2. Data Kriminal untuk Papua Barat merupakan akumulasi dari data semua Polres/ Polresta se-Papua Barat untuk setiap indikator kriminalitas.
3. Data Jumlah Tindak Pidana Kab. Manokwari tidak terbit.



**Tabel 5.**  
**Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)**  
**per 100.000 penduduk Tahun 2012-2014**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(3)	(4)	(4)
Fakfak	51.20	37.662	96.0
Kaimana	393	238	3.0
Teluk Wondama	16.07	20.6	2.85
Teluk Bintuni	0.93	1.55	-
Manokwari	26.5	27.8	-
Sorong Selatan	11.55	22.83	22.53
Sorong	8	106	145
Raja Ampat	12.89	-	30.5
Kota Sorong	17.0	23.32	32.04
<b>Papua Barat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

*Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat*

- Catatan :
1. Keberadaan Polres untuk Kabupaten Tambrauw dan Maybrat belum ada, sehingga Data Kabupaten Tambrauw dan Maybrat masih tergabung dalam data Kabupaten Induk yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
  2. Data Kriminal untuk Papua Barat merupakan akumulasi dari data semua Polres/ Polresta se-Papua Barat untuk setiap indikator kriminalitas.
  3. Data Jumlah Tindak Pidana Kab. Manokwari tidak terbit.

**Tabel 6**  
**Jumlah Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia**  
**di Papua Barat Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana				
	Pembunuhan	Perkosaan	Penganiayaan Ringan	Penganiayaan Berat	Penculikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	0	1	70	0	0
Kaimana	1	2	23	0	0
Teluk Wondama	0	1	14	1	0
Teluk Bintuni	1	1	10	2	0
Manokwari	6	3	0	0	0
Sorong Selatan	0	3	40	0	0
Sorong	0	0	18	0	0
Raja Ampat	0	3	13	0	0
Kota Sorong	2	26	0	0	7
<b>Papua Barat</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>188</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat

- Catatan : 1. Keberadaan Polres untuk Kabupaten Tambrauw dan Maybrat belum ada, sehingga Data Kabupaten Tambrauw dan Maybrat masih tergabung dalam data Kabupaten Induk yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
2. Data Kriminal untuk Papua Barat merupakan akumulasi dari data semua Polres/Polresta se-Papua Barat untuk setiap indikator kriminalitas.
3. Data Jumlah Tindak Pidana Kab. Manokwari tidak terbit.

**Tabel 7.**  
**Jumlah Tindak Pidana Terhadap Hak Milik (Barang) Menurut Jenis Tindak Pidana di Papua Barat Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana				
	Pembakaran dengan sengaja	Pengrusakan/ Penghancuran barang	Pencurian dengan pemberatan	Pencurian ringan	Pencurian dengan kekerasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	0	17	28	17	0
Kaimana	1	7	0	17	0
Teluk Wondama	0	3	0	9	0
Teluk Bintuni	0	1	0	8	0
Manokwari	0	25	83	0	24
Sorong Selatan	5	12	0	17	0
Sorong	0	12	46	2	0
Raja Ampat	0	2	0	5	0
Kota Sorong	0	17	74	18	39
<b>Papua Barat</b>	<b>6</b>	<b>96</b>	<b>231</b>	<b>93</b>	<b>63</b>

Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat

- Catatan : 1. Keberadaan Polres untuk Kabupaten Tambrauw dan Maybrat belum ada, sehingga Data Kabupaten Tambrauw dan Maybrat masih tergabung dalam data Kabupaten Induk yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
2. Data Kriminal untuk Papua Barat merupakan akumulasi dari data semua Polres/ Polresta se-Papua Barat untuk setiap indikator kriminalitas.

Lanjutan Tabel 7.

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana				
	Pencurian dalam keluarga	Penipuan/Perbuatan curang	Penadahan	Pencurian kendaraan bermotor	Pencurian Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	0	11	0	3	0
Kaimana	0	5	0	0	0
Teluk Wondama	0	13	0	1	0
Teluk Bintuni	0	11	0	0	0
Manokwari	0	56	0	0	0
Sorong Selatan	0	24	0	4	0
Sorong	0	21	0	0	0
Raja Ampat	0	5	0	0	0
Kota Sorong	0	37	0	67	0
<b>Papua Barat</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>

Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat

- Catatan :
1. Keberadaan Polres untuk Kabupaten Tambrauw dan Maybrat belum ada, sehingga Data Kabupaten Tambrauw dan Maybrat masih tergabung dalam data Kabupaten Induk yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
  2. Data Kriminal untuk Papua Barat merupakan akumulasi dari data semua Polres/Polresta se-Papua Barat untuk setiap indikator kriminalitas.
  3. Data Jumlah Tindak Pidana Kab. Manokwari tidak terbit.

**Tabel 8.**  
**Jumlah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**  
**di Papua Barat, Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Narkotika	Obat Keras
(2)	(3)	(4)
Fakfak	1	0
Kaimana	0	0
Teluk Wondama	0	0
Teluk Bintuni	0	0
Manokwari	0	0
Sorong Selatan	0	0
Sorong	1	0
Raja Ampat	0	0
Kota Sorong	0	0
<b>Papua Barat</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat

- Catatan : 1. Keberadaan Polres untuk Kabupaten Tambrauw dan Maybrat belum ada, sehingga Data Kabupaten Tambrauw dan Maybrat masih tergabung dalam data Kabupaten Induk yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
2. Data Kriminal untuk Papua Barat merupakan akumulasi dari data semua Polres/ Polresta se-Papua Barat untuk setiap indikator kriminalitas.
3. Data Jumlah Tindak Pidana Kab. Manokwari tidak terbit.

**Tabel 9.**  
**Tindak Kejahatan Menonjol (Crime Index)**  
**di Papua Barat Tahun 2012 - 2013**

Kasus	Fak- Fak		Kaimana	
	2012	2013	2012	2013
(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
Pencurian dengan pemberatan	30	28	-	-
Pencurian Kendaraan Bermotor	8	3	-	-
Pencurian dengan kekerasan	-	-	-	-
Penganiayaan Berat	1	-	-	-
Kebakaran	3	2	4	3
Pembunuhan	-	-	-	1
Perkosaan	1	1	2	-
Kenakalan Remaja	-	-	-	-
Uang Palsu	-	-	-	-
Narkotika	5	1	-	-
Perjudian	15	9	1	2
Pemerasan dan pengancaman	3	1	6	5
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>11</b>

**Lanjutan Tabel 9.**

Kasus	Teluk Wondama		Teluk Bintuni	
	2012	2013	2010	2011
(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
Pencurian dengan pemberatan	-	-	3	-
Pencurian Kendaraan Bermotor	1	1	-	-
Pencurian dengan kekerasan	-	-	-	-
Penganiayaan Berat	2	1	1	2
Kebakaran	-	-	1	1
Pembunuhan	2	-	3	1
Perkosaan	-	1	-	1
Kenakalan Remaja	-	-	-	-
Uang Palsu	-	1	-	-
Narkotika	-	-	-	-
Perjudian	-	-	1	3
Pemerasan dan pengancaman	3	-	-	-
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

**Lanjutan Tabel 9.**

Kasus	Manokwari		Sorong Selatan	
	2012	2013	2012	2013
(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
Pencurian dengan pemberatan	61	83	-	-
Pencurian Kendaraan Bermotor	12	35	3	4
Pencurian dengan kekerasan	10	24	-	-
Penganiayaan Berat	112	144	-	-
Kebakaran	1	1	5	5
Pembunuhan	7	6	1	-
Perkosaan	6	3	2	3
Kenakalan Remaja	-	-	-	-
Uang Palsu	-	-	-	-
Narkotika	-	-	-	-
Perjudian	1	5	1	1
Pemerasan dan pengancaman	3	9	-	3
<b>Total</b>	<b>213</b>	<b>310</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat

- Catatan : 1. Keberadaan Polres untuk Kabupaten Tambrauw dan Maybrat belum ada, sehingga Data Kabupaten Tambrauw dan Maybrat masih tergabung dalam data Kabupaten Induk yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
2. Data Kriminal untuk Papua Barat merupakan akumulasi dari data semua Polres/ Polresta se-Papua Barat untuk setiap indikator kriminalitas.



**Lanjutan Tabel 9.**

Kasus	Sorong		Raja Ampat	
	2012	2013	2012	2013
(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
Pencurian dengan pemberatan	27	46	-	-
Pencurian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
Pencurian dengan kekerasan	4	-	-	-
Penganiayaan Berat	-	-	-	-
Kebakaran	-	-	-	-
Pembunuhan	-	-	-	-
Perkosaan	-	-	-	-
Kenakalan Remaja	-	-	-	-
Uang Palsu	-	-	-	-
Narkotika	1	1	-	-
Perjudian	-	-	-	-
Pemerasan dan pengancaman	-	3	-	-
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>50</b>	-	-

Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat

- Catatan : 1. Keberadaan Polres untuk Kabupaten Tambrauw dan Maybrat belum ada, sehingga Data Kabupaten Tambrauw dan Maybrat masih tergabung dalam data Kabupaten Induk yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
2. Data Kriminal untuk Papua Barat merupakan akumulasi dari data semua Polres/ Polresta se-Papua Barat untuk setiap indikator kriminalitas.

**Lanjutan Tabel 9.**

<b>Kasus</b>	<b>Kota Sorong</b>	
	<b>2012</b>	<b>2013</b>
(2)	(3)	(4)
Pencurian dengan pemberatan	79	76
Pencurian Kendaraan Bermotor	-	67
Pencurian dengan kekerasan	17	37
Penganiayaan Berat	156	-
Kebakaran	4	5
Pembunuhan	-	2
Perkosaan	4	26
Kenakalan Remaja	-	-
Uang Palsu	-	-
Narkotika	-	-
Perjudian	6	6
Pemerasan dan pengancaman	5	-
<b>Total</b>	<b>271</b>	<b>219</b>

**Tabel 10.**  
**Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) Pelaku Tindak Pidana**  
**Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Dewasa		Anak-anak		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L + P
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Fakfak	208	22	8	1	216	23	239
Kaimana	110	15	10	16	120	31	151
Teluk Wondama	52	1	2	0	54	1	55
Teluk Bintuni	54	4	0	0	54	4	58
Manokwari	210	50	15	0	225	50	275
Sorong Selatan	120	49	0	3	120	52	172
Sorong	145	6	0	11	145	17	162
Raja Ampat	55	4	0	0	55	4	59
Kota Sorong	391	46	-	-	391	46	437
<b>Papua Barat</b>	<b>845</b>	<b>333</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>885</b>	<b>373</b>	<b>1.258</b>

Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat

- Catatan : 1. Keberadaan Polres untuk Kabupaten Tambrauw dan Maybrat belum ada, sehingga Data Kabupaten Tambrauw dan Maybrat masih tergabung dalam data Kabupaten Induk yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
2. Data Kriminal untuk Papua Barat merupakan akumulasi dari data semua Polres/ Polresta se-Papua Barat untuk setiap indikator kriminalitas.

**Tabel 11.**  
**Jumlah Warga Negara Asing (WNA) Pelaku Tindak Pidana Menurut**  
**Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Dewasa		Anak-anak		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L + P
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Fakfak	-	-	-	-	-	-	-
Kaimana	-	-	-	-	-	-	-
Teluk Wondama	-	-	-	-	-	-	-
Teluk Bintuni	-	-	-	-	-	-	-
Manokwari	-	-	-	-	-	-	-
Sorong Selatan	-	-	-	-	-	-	-
Sorong	-	-	-	-	-	-	-
Raja Ampat	-	-	-	-	-	-	-
Kota Sorong	-	-	-	-	-	-	-
<b>Papua Barat</b>	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat

- Catatan : 1. Keberadaan Polres untuk Kabupaten Tambrauw dan Maybrat belum ada, sehingga Data Kabupaten Tambrauw dan Maybrat masih tergabung dalam data Kabupaten Induk yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
2. Data Kriminal untuk Papua Barat merupakan akumulasi dari data semua Polres/ Polresta se-Papua Barat untuk setiap indikator kriminalitas.

**Tabel 12.**  
**Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin di Papua Barat Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	WNI			WNA			Jumlah		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(2)	(3)	(4)	(9)	(5)	(6)	(9)	(7)	(8)	(9)
Fakfak	216	23	239	-	-	-	216	23	239
Kaimana	120	31	151	-	-	-	120	31	151
Teluk Wondama	54	1	55	-	-	-	54	1	55
Teluk Bintuni	54	4	58	-	-	-	54	4	58
Manokwari	225	50	275	-	-	-	225	50	275
Sorong Selatan	123	49	172	-	-	-	123	49	172
Sorong	145	17	162	-	-	-	145	17	162
Raja Ampat	55	4	59	-	-	-	55	4	59
Kota Sorong	885	373	1.258	-	-	-	885	373	1.258
<b>Papua Barat</b>	<b>1.877</b>	<b>552</b>	<b>2.429</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.877</b>	<b>552</b>	<b>2.429</b>

Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat

- Catatan : 1. Keberadaan Polres untuk Kabupaten Tambrauw dan Maybrat belum ada, sehingga Data Kabupaten Tambrauw dan Maybrat masih tergabung dalam data Kabupaten Induk yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
2. Data Kriminal untuk Papua Barat merupakan akumulasi dari data semua Polres/ Polresta se-Papua Barat untuk setiap indikator kriminalitas.

**Tabel 13.**  
**Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota**  
**dan Keberadaan Pekelahan Massal di Wilayahnya Tahun 2011**

Kabupaten/ Kota	Ada Kejadian Perkelahan Massal		Tidak Ada Kejadian Perkelahan Massal		Jumlah Desa/ Kelurahan	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)
Fakfak	10	8,06	114	91,94	124	100,00
Kaimana	4	4,65	82	95,35	86	100,00
Teluk Wondama	6	7,89	70	92,11	76	100,00
Teluk Bintuni	2	1,32	150	98,68	152	100,00
Manokwari	22	5,28	395	94,72	417	100,00
Sorong Selatan	13	10,92	106	89,08	119	100,00
Sorong	1	0,74	134	99,26	135	100,00
Raja Ampat	2	1,67	118	98,33	120	100,00
Tambrau	8	16,00	42	84,00	50	100,00
Maybrat	1	0,78	128	99,22	129	100,00
Kota Sorong	10	32,26	21	67,74	31	100,00
<b>Papua Barat</b>	<b>79</b>	<b>5,49</b>	<b>1360</b>	<b>94,51</b>	<b>1439</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Podes 2011

**Tabel 14.**  
**Banyaknya Desa/Kelurahan yang Selama Tahun yang Lalu Menjadi**  
**Lokasi Konflik Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota dan**  
**Jenis Pekelahan Massal Tahun 2011**

Kabupaten/Kota	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa/ Kelurahan	Warga Dengan Aparat Keamanan	Warga Dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	10	3	-	-
Kaimana	4	-	1	1
Teluk Wondama	4	1	-	2
Teluk Bintuni	2	-	-	-
Manokwari	13	8	1	-
Sorong Selatan	8	9	-	1
Sorong	1	-	-	-
Raja Ampat	-	1	1	-
Tambrauw	3	5	-	1
Maybrat	1	-	-	-
Kota Sorong	10	-	-	-
<b>Papua Barat</b>	<b>56</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

Sumber : Podes 2011

**Lanjutan Tabel 14.**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Antar Pelajar/ Mahasiswa</b>	<b>Antar Suku</b>	<b>Lainnya</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)
Fakfak	-	-	-	13
Kaimana	1	1	-	8
Teluk Wondama	-	-	-	7
Teluk Bintuni	-	-	-	2
Manokwari	1	-	1	24
Sorong Selatan	-	-	-	18
Sorong	-	-	-	1
Raja Ampat	-	-	-	2
Tambrau	-	-	-	9
Maybrat	-	-	-	1
Kota Sorong	-	-	1	11
<b>Papua Barat</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>96</b>

Sumber : Podes 2011



**Tabel 15.**  
**Persentase Desa/Kelurahan yang Selama Tahun yang Lalu Menjadi**  
**Lokasi Konflik Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota dan**  
**Jenis Pekelahan Massal Tahun 2011**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Antar Kelompok Warga</b>	<b>Warga Antar Desa/ Kelurahan</b>	<b>Warga Dengan Aparat Keamanan</b>	<b>Warga Dengan Aparat Pemerintah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	76,92	23,08	0,00	0,00
Kaimana	50,00	0,00	12,50	12,50
Teluk Wondama	57,14	14,29	0,00	28,57
Teluk Bintuni	100,00	0,00	0,00	0,00
Manokwari	54,17	33,33	4,17	0,00
Sorong Selatan	44,44	50,00	0,00	5,56
Sorong	100,00	0,00	0,00	0,00
Raja Ampat	0,00	50,00	50,00	0,00
Tambrauw	33,33	55,56	0,00	11,11
Maybrat	100,00	0,00	0,00	0,00
Kota Sorong	90,91	0,00	0,00	0,00
<b>Papua Barat</b>	<b>58,33</b>	<b>28,13</b>	<b>3,13</b>	<b>5,21</b>

Sumber : Podes 2011

**Lanjutan Tabel 15.**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Antar Pelajar/ Mahasiswa</b>	<b>Antar Suku</b>	<b>Lainnya</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Fakfak	0,00	0,00	0,00	100,00
Kaimana	12,50	12,50	0,00	100,00
Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	100,00
Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	100,00
Manokwari	4,17	0,00	4,17	100,00
Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	100,00
Sorong	0,00	0,00	0,00	100,00
Raja Ampat	0,00	0,00	0,00	100,00
Tambrau	0,00	0,00	0,00	100,00
Maybrat	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Sorong	0,00	0,00	9,09	100,00
<b>Papua Barat</b>	<b>2,08</b>	<b>1,04</b>	<b>2,08</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Podes 2011

**Tabel 16.**  
**Jumlah Desa/Kelurahan yang Selama Tahun yang Lalu Menjadi Lokasi Konflik Perkelahian Massal dan Jenis Perkelahian dan Penyebab Utama Perkelahian Massal Tahun 2011**

Penyebab Utama	Jenis Perkelahian Massal			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa/Kelurahan	Warga Dengan Aparat Keamanan	Warga Dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Keramaian	2	1	1	0
Asmara	9	8	0	0
Olahraga	4	0	0	0
Kekuasaan	3	4	0	0
Ideologi/ Kepercayaan	1	0	0	0
Dendam Lama	6	4	0	1
Ketidakpuasan atas kebijakan/ Pelayanan	3	2	1	3
Lainnya	28	8	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>56</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

Sumber : Podes 2011

**Lanjutan Tabel 17.**

Penyebab Utama	Jenis Pekelahan Massal			Jumlah
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Keramaian	0	0	0	4
Asmara	2	0	0	19
Olahraga	0	0	0	4
Kekuasaan	0	1	0	8
Ideologi/Kepercayaan	0	0	1	2
Dendam Lama	0	0	0	11
Ketidakpuasan atas kebijakan/Pelayanan	0	0	0	9
Lainnya	0	0	1	39
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>96</b>

Sumber : Podes 2011

**Tabel 18.**  
**Persentase Desa/Kelurahan yang Selama Tahun yang Lalu Menjadi**  
**Lokasi Konflik Perkelahian Massal dan Jenis Perkelahian dan**  
**Penyebab Utama Perkelahian Massal Tahun 2011**

Penyebab Utama	Jenis Perkelahian Massal			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa/Kelurahan	Warga Dengan Aparat Keamanan	Warga Dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Keramaian	3,57	3,70	33,33	0,00
Asmara	16,07	29,63	0,00	0,00
Olahraga	7,14	0,00	0,00	0,00
Kekuasaan	5,36	14,81	0,00	0,00
Ideologi/ Kepercayaan	1,79	0,00	0,00	0,00
Dendam Lama	10,71	14,81	0,00	20,00
Ketidakpuasan atas kebijakan/Pelayanan	5,36	7,41	33,33	60,00
Lainnya	50,00	29,63	33,33	20,00
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Podes 2011

**Lanjutan Tabel 18.**

Penyebab Utama	Jenis Pekelahan Massal			Jumlah
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Keramaian	0,00	0,00	0,00	4,17
Asmara	100,00	0,00	0,00	19,79
Olahraga	0,00	0,00	0,00	4,17
Kekuasaan	0,00	100,00	0,00	8,33
Ideologi/ Kepercayaan	0,00	0,00	50,00	2,08
Dendam Lama	0,00	0,00	0,00	11,46
Ketidakpuasan atas kebijakan/Pelayanan	0,00	0,00	0,00	9,38
Lainnya	0,00	0,00	50,00	40,63
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Podes 2011

**Tabel 19.**  
**Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Selama Tahun yang**  
**Lalu Menjadi Lokasi Konflik Perkelahian Massal dan Hasil**  
**Penyelesaian Pekelahan Massal Tahun 2011**

Kabupaten/Kota	Hasil Penyelesaian Perkelahian Massal				Jumlah Desa/ Kelurahan	
	Selesai		Tidak Selesai		N	%
	N	%	N	%		
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)
Fakfak	10	100,00	0	0,00	10	100,00
Kaimana	4	100,00	0	0,00	4	100,00
Teluk Wondama	5	83,33	1	16,67	6	100,00
Teluk Bintuni	1	50,00	1	50,00	2	100,00
Manokwari	18	81,82	4	18,18	22	100,00
Sorong Selatan	13	100,00	0	0,00	13	100,00
Sorong	1	100,00	0	0,00	1	100,00
Raja Ampat	2	100,00	0	0,00	2	100,00
Tambrauw	8	100,00	0	0,00	8	100,00
Maybrat	1	100,00	0	0,00	1	100,00
Kota Sorong	10	100,00	0	0,00	10	100,00
<b>Papua Barat</b>	<b>73</b>	<b>92,41</b>	<b>6</b>	<b>7,59</b>	<b>79</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Podes 2011

**Tabel 20.**  
**Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Selama Tahun yang**  
**Lalu Menjadi Lokasi Konflik Perkelahian Massal dan Cara**  
**Penyelesaian Konflik Tahun 2011**

Kabupaten/Kota	Cara Penyelesaian Perkelahian Massal				Jumlah Desa/ Kelurahan	
	Dengan Inisiator		Tanpa Inisiator		N	%
	N	%	N	%		
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)
Fakfak	10	100,00	0	0,00	10	100,00
Kaimana	4	100,00	0	0,00	4	100,00
Teluk Wondama	6	100,00	0	0,00	6	100,00
Teluk Bintuni	2	100,00	0	0,00	2	100,00
Manokwari	20	90,91	2	9,09	22	100,00
Sorong Selatan	13	100,00	0	0,00	13	100,00
Sorong	1	100,00	0	0,00	1	100,00
Raja Ampat	2	100,00	0	0,00	2	100,00
Tambrauw	8	100,00	0	0,00	8	100,00
Maybrat	1	100,00	0	0,00	1	100,00
Kota Sorong	10	100,00	0	0,00	10	100,00
<b>Papua Barat</b>	<b>77</b>	<b>97,47</b>	<b>2</b>	<b>2,53</b>	<b>79</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Podes 2011



**Tabel 21.**  
**Persentase Desa/Kelurahan yang Menjadi Lokasi Konflik**  
**Perkelahian Menurut Inisiator/Mediator yang**  
**Dilibatkan Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tahun 2011**

Kabupaten/ Kota	Inisiator/Mediator yang Dilibatkan Dalam Penyelesaian Pekelahan Massal					
	Aparat Keamanan		Aparat Pemerintah		Tokoh Masyarakat	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	4	40,00	1	10,00	3	30,00
Kaimana	1	25,00	0	0,00	2	50,00
Teluk Wondama	0	0,00	1	20,00	1	20,00
Teluk Bintuni	1	100,00	0	0,00	0	0,00
Manokwari	4	22,22	0	0,00	10	55,56
Sorong Selatan	7	53,85	2	15,38	4	30,77
Sorong	0	0,00	1	100,00	0	0,00
Raja Ampat	1	50,00	0	0,00	1	50,00
Tambrau	2	25,00	0	0,00	5	62,50
Maybrat	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Kota Sorong	2	20,00	0	0,00	1	10,00
<b>Papua Barat</b>	<b>22</b>	<b>30,14</b>	<b>5</b>	<b>6,85</b>	<b>28</b>	<b>38,36</b>

Sumber : Podes 2011

**Lanjutan Tabel 21.**

Kabupaten/ Kota	Inisiator/Mediator yang Dilibatkan Dalam Penyelesaian Pekelahan Massal					
	Tokoh Agama		Aparat Keamanan dan Tokoh Masyarakat		Aparat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kaimana	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Teluk Wondama	0	0,00	0	0,00	1	20,00
Teluk Bintuni	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Manokwari	0	0,00	0	0,00	1	5,56
Sorong Selatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sorong	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Raja Ampat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tambrau	1	12,50	0	0,00	0	0,00
Maybrat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kota Sorong	0	0,00	2	20,00	1	10,00
<b>Sumber Data: BPS Papua Barat</b>	<b>1</b>	<b>1,37</b>	<b>2</b>	<b>2,74</b>	<b>3</b>	<b>4,11</b>

**Lanjutan Tabel 21.**

Kabupaten/ Kota	Inisiator/Mediator yang Dilibatkan Dalam Penyelesaian Pekelahan Massal					
	Aparat Keamanan, Aparat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat		Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama		Aparat Keamanan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	1	10,00	0	0,00	1	10,00
Kaimana	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Teluk Wondama	0	0,00	1	20,00	0	0,00
Teluk Bintuni	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Manokwari	1	5,56	1	5,56	0	0,00
Sorong Selatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sorong	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Raja Ampat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tambrau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Maybrat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kota Sorong	2	20,00	0	0,00	1	10,00
<b>Papua Barat</b>	<b>4</b>	<b>5,48</b>	<b>2</b>	<b>2,74</b>	<b>2</b>	<b>2,74</b>

Sumber : Podes 2011

**Lanjutan Tabel 21.**

Kabupaten/ Kota	Inisiator/Mediator yang Dilibatkan Dalam Penyelesaian Pekelahan Massal					
	Aparat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama		Aparat Keamanan, Aparat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama		Lainnya	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kaimana	0	0,00	1	25,00	0	0,00
Teluk Wondama	1	20,00	0	0,00	0	0,00
Teluk Bintuni	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Manokwari	0	0,00	0	0,00	1	5,56
Sorong Selatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sorong	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Raja Ampat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tambrauw	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Maybrat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kota Sorong	0	0,00	0	0,00	1	10,00
<b>Papua Barat</b>	<b>1</b>	<b>1,37</b>	<b>1</b>	<b>1,37</b>	<b>2</b>	<b>2,74</b>

Sumber : Podes 2011